

BAB II

JUGUN IANFU DAN DILEMA HUBUNGAN JEPANG DAN KOREA SELATAN

Dalam Bab ini, penulis akan memfokuskan pembahasan pada sejarah munculnya sistem perbudakan seksual pada masa pendudukan Jepang ditahun 1910 sampai 1945. Dan pengaruhnya terhadap hubungan Jepang dan Korea Selatan. Penulis ingin menunjukkan bahwa permasalahan historis yang terjadi diantara Jepang dan Korea Selatan dapat mempengaruhi hubungan kerjasama diantara keduanya.

A. Hubungan Jepang dan Korea Selatan sebelum Perang dunia II

Hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan secara resmi terjalin pada 28 Desember 1965. Pembentukan hubungan kedua negara tersebut ditandai dengan perjanjian tentang hubungan dasar antar negara. namun sebelum penandatanganan perjanjian pembentukan hubungan diplomatik pada 28 Desember tersebut, Jepang dan Korea Selatan sudah menjalin hubungan sejak Abad 18 melalui hubungan perdagangan diantara keduanya.

Hubungan perdagangan diantara Jepang dan Korea sejatinya dapat dikatakan tidak seimbang dan lebih menguntungkan pihak Jepang. Hal ini dikarenakan beberapa perjanjian perdagangan yang dicapai diantara keduanya sejak tahun 1876 memuat pasal pasal yang berat sebelah.³⁷ Seperti pada perjanjian Kanghwa, dimana Korea yang saat itu dipimpin oleh Kerajaan Chosun harus membangun pelabuhan untuk memudahkan perdagangan antara keduanya, mengizinkan pembangunan rumah bagi pedagang jepang, mencabut

³⁷ Yang Seung Yoon-Nur Aini Setiawati, Sejarah Korea, Sejak Awal Abad hingga Masa Kontemporer (Jakarta:Gadjah Mada University Press,2003). p 122

larangan kegiatan transaksi bagi orang Jepang. Serta memberikan hak yudikatif kepada konsuler Jepang untuk mengadakan tindak kriminal yang dilakukan oleh Jepang.³⁸ Dengan adanya perjanjian yang tidak seimbang ini memperlancar kepentingan Jepang untuk melakukan invasi politik ke internal Korea. Selain itu, dengan adanya perjanjian ini membuat Korea harus bertindak adil kepada negara-negara lain dan memberikan hak yang sama dengan apa yang diberikan kepada Jepang.³⁹

Motif Jepang mulai melakukan pendekatan baik dengan motif perdagangan maupun politik dilandasi oleh tujuan politis.⁴⁰ Tujuan tersebut adalah untuk menjadikan Jepang sebagai negara daratan untuk dapat memperluas kekuatannya di Asia. Tujuan politis tersebut hanya akan tercapai jika Jepang dapat menguasai Semenanjung Korea.⁴¹ Maka dari itu, Jepang mulai melakukan pendekatan melalui hubungan perdagangan pada tahun 1876, hingga puncaknya, Jepang secara resmi menduduki Semenanjung Korea pada tahun 1910.

Sebelum secara resmi menduduki Semenanjung Korea, Jepang terlebih dahulu memotong pengaruh Tiongkok dan Uni Soviet dengan mendeklarasikan perang terhadap keduanya.⁴² Semenanjung Korea saat itu merupakan wilayah kekuasaan Uni Soviet, sehingga untuk mendapatkan Semenanjung Korea dan mencapai kepentingan politiknya, Jepang harus berperang melawan Uni Soviet dan sekutunya Tiongkok. Setelah berhasil menang dalam perang, Jepang memulai pendudukannya di Semenanjung Korea. Pendudukan ini ditandai dengan

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

⁴⁰ Yang Seung-Yoon & Mohtar Mas'ood, Politik, Ekonomi, Masyarakat Korea : Pokok-pokok Kepentingan dan Permasalahannya (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2007), p 21

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid, p 21-22

penandatanganan perjanjian pendudukan oleh Perdana Menteri Yi Wan-Yong pada 22 Agustus 1910. Perjanjian tersebut kemudian diumumkan oleh Raja Sunjong pada 29 Agustus 1910 kepada seluruh rakyat Korea.⁴³

Setelah resmi menduduki Semenanjung Korea, Jepang mulai melakukan eksploitasi besar besaran. Jepang memberlakukan kerja paksa kepada rakyat Korea. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia selama berperang dengan blok poros. Selain kerja paksa, Jepang juga mengambil persediaan pangan yang dimiliki Semenanjung Korea untuk memenuhi kebutuhan pangan saat berperang. Selain itu, Jepang juga mulai masuk kedalam masalah internal Korea dan mengambil alih hak tanah dan hak pengaturan mata uang yang dimiliki oleh Korea. Selanjutnya, Jepang juga mulai mengambil alih masalah hubungan diplomatik Korea. Segala urusan terkait hubungan diplomatik Korea, harus melalui persetujuan Jepang.

B. Munculnya *Comfort System* dan *Jugun Ianfu*

Selain memberlakukan kerja paksa, ada kebijakan lain yang cukup kontroversial yang pernah diterapkan Jepang di wilayah pendudukannya termasuk Korea. Kebijakan tersebut adalah kebijakan *Comfort System*. Kebijakan *comfort system* sendiri merupakan kebijakan perbudakan seksual yang sistematis dan brutal yang bertujuan untuk memenuhi hasrat seksual tentara Jepang selama berada di daerah pendudukan. Tercatat 80.000 sampai dengan 200.000 wanita menjadi *comfort women* selama perang dunia II dengan persentase 80 persen berasal dari Korea.⁴⁴

⁴³ Yang Seung Yoon-Nur Aini Setiawati, Loc.Cit p 134

⁴⁴ Mina Chang, "The Politics of an Apology: Japan and Resolving the "Comfort Women" Issue", Harvard International Review, Vol. 31, No. 3 (FALL 2009), pp. 34-37, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/42763319>.

Kebijakan *comfort system* ini muncul berawal dari agresi militer Jepang di Nanjing, Tiongkok. Dalam agresi ini, Jepang berhasil menghancurkan Nanjing. Peristiwa ini dikenal dengan “*The Rape of Nanjing*”. Istilah ini digunakan karena selain menghancurkan Nanjing, para tentara Jepang juga melakukan kejahatan seksual terhadap para gadis dan wanita Nanjing. Banyak gadis dan wanita yang menjadi korban pemerkosaan dari para tentara Jepang. Peristiwa ini akhirnya menjadi sorotan banyak media internasional.⁴⁵

Melihat banyaknya pemberitaan internasional terkait peristiwa ini, Kaisar Hirohito kemudian berdiskusi dengan para menteri, konsul, dan panglima perang. Diskusi ini bertujuan mencari solusi untuk mengatasi masalah ini dan mengembalikan kehormatan Jepang atau “*Honor of Japan*”. Selain itu, juga untuk menghentikan arus berita dari media internasional. Dari diskusi ini, terdapat dua ide yang dapat diterapkan. Pertama, dengan merubah kode etik militer Jepang. Dan yang kedua, menciptakan sebuah sistem yang disebut oleh militer Jepang sebagai “*Comfort System*”. *Comfort Station* sendiri sebenarnya sudah dibangun sejak tahun 1932 di beberapa tempat di dekat barak militer Jepang di Tiongkok. *Comfort Station* ini memiliki lisensi yang diberikan oleh pemerintah Jepang langsung. Namun, setelah peristiwa “*The Rape of Nanjing*”, *Comfort Station* ini berubah menjadi sebuah fasilitas perbudakan seksual.⁴⁶

Kemunculan kebijakan *comfort system* didasari oleh beberapa alasan. Alasan pertama adalah terkait dengan “*Honor of Japan*”. Dengan adanya fasilitas perbudakan seksual ini diharapkan tidak ada lagi peristiwa seperti “*The Rape of Nanking*”. Melalui fasilitas ini, pemerintah dapat mengontrol perilaku tentara jepang agar tidak melakukan tindakan tindakan asusila yang nantinya akan merugikan dan merusak

⁴⁵ Carmen M. Argibay, *Sexual Slavery and the Comfort Women of World War II*, 21 Berkeley J. Int'l Law. 375 (2003). Available at: <http://scholarship.law.berkeley.edu/bjil/vol21/iss2/6>,

⁴⁶ Ibid

kehormatan Jepang.⁴⁷ Alasan selanjutnya adalah untuk menjaga citra Jepang di daerah pendudukannya. Adanya tindakan asusila dari tentara Jepang menimbulkan sentiment anti Jepang di daerah pendudukannya. Sentiment ini kemudian berdampak buruk terhadap citra dan militer Jepang.⁴⁸ Alasan yang terakhir adalah untuk menjaga kesehatan para tentara Jepang dan mengurangi biaya kesehatan. Tindakan asusila yang selama ini dilakukan oleh tentara Jepang menyebabkan adanya penularan penyakit seksual. Banyak tentara Jepang yang terserang penyakit dan bahkan harus pulang ke Jepang sebelum dirinya mulai berperang. Hal ini tentunya merugikan militer Jepang saat itu. Selain itu, Penyebaran penyakit seksual ini kemudian menyebabkan pembengkakan biaya kesehatan untuk para tentara Jepang.⁴⁹

Perekrutan *Jugun Ianfu* sendiri dilakukan dengan perekrutan terselubung, yaitu dengan menawarkan wanita muda untuk menjadi buruh, perawat atau pekerjaan lainnya. Pekerjaan tersebut dikatakan sebagai bentuk "*voluntary*". Namun dalam pelaksanaannya para wanita tersebut malah dipaksa untuk ikut dan kemudian dimasukkan kedalam rumah bordil dan dijadikan sebagai *Jugun Ianfu*. Wanita yang menjadi sasaran kebijakan ini biasanya masih perawan, belum menikah dan tidak terjangkau penyakit seksual. Adapun wanita Jepang yang menjadi *Jugun Ianfu* adalah pekerja seks profesional, bukan wanita Jepang yang perawan. Hal ini dikarenakan, wanita Jepang tidak diperbolehkan menjadi *Jugun Ianfu* dikarenakan sedang menjadi objek misi Jepang "*The National Mission of Motherhood*".⁵⁰

⁴⁷ Ibid, p.376

⁴⁸ Ibid, p. 377

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Chunghee Sarah Soh, "The Korean "Comfort Women": Movement for Redress". Asian Survey, Vol. 36, No. 12 (Dec., 1996), pp. 1226-1240, 1227-1228

C. Isu *Jugun Ianfu* dalam Hubungan Jepang dan Korea Selatan Pasca Perang Dunia II

Jepang dan Korea Selatan memulai hubungan diplomatik pada 28 Desember 1965. Pembentukan hubungan diplomatik diantara keduanya ditandai oleh penandatanganan perjanjian dasar tentang hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan. Salah satu poin penting perjanjian ini adalah bahwa setiap permasalahan terkait sejarah pendudukan di masa lalu, di selesaikan melalui perjanjian ini. Namun tentu, momen pendudukan dimasa lalu tidak akan mudah untuk dilupakan dan akan terus membayangi hubungan kedua negara, terutama bagi Korea Selatan.⁵¹ sehingga pada kenyataannya, banyak permasalahan yang timbul Jepang dan Korea Selatan terkait sejarah pendudukan Jepang dimasa lalu. Sebagai contoh, sengketa Pulau Dokdo atau Takeshima yang tak kunjung selesai. Selain itu permasalahan permasalahan sejarah lainnya termasuk permasalahan perbudakan Seks yang terjadi pada rentang waktu 1937 sampai tahun 1945.

Isu *Jugun Ianfu* di Jepang sendiri sudah berkembang lebih dulu dibanding dengan di Korea Selatan. Di Jepang, isu *Jugun Ianfu* bukan lagi isu yang tabu untuk dibicarakan. Selain itu, banyaknya buku dan memoir yang membahas tentang *Jugun Ianfu* membuat isu ini menjadi isu yang familiar bagi masyarakat Jepang. Namun, dengan banyaknya literatur yang membahas terkait isu ini, tidak membuat isu ini menjadi isu yang patut diprioritaskan. Hal mengakibatkan angapan bahwa *Jugun Ianfu* hanyalah sebuah cerita biasa mengenai perempuan yang menderita akibat perang. Dengan kata lain isu ini adalah hal yang biasa terjadi dalam perang.⁵² Sementara itu, Permasalahan perbudakan seks sendiri mulai muncul kembali di Korea Selatan pada tahun awal tahun 1990. Namun pada saat itu, isu *comfort women* ini belum mendapatkan perhatian

⁵¹ Tulus Warsito, 2007, "Nosajoeng : Rahasia Kembangkitan dan Percepatan Demokrasi Korea", (Yogyakarta, Pilar Media), 53.

⁵² Ibid, p. 812-813

masyarakat.⁵³ Baru pada tahun 1992, isu *Jugun Ianfu* mendapat perhatian dari para aktivis dan masyarakat yang peduli terhadap nasib *Jugun Ianfu*.

Isu *Jugun Ianfu* mulai berkembang pada tahun 1992 di Korea Selatan. Pada saat itu beberapa aktivis yang peduli akan nasib para korban kebijakan perbudakan seksual Jepang melakukan demonstrasi didepan kedutaan besar Jepang di Seoul. Demonstrasi ini dalam rangka mendesak pemerintahan Jepang untuk bertanggung Jawab atas kebijakan perbudakan seksual yang terjadi pada masa pendudukan Jepang.

Demonstrasi ini kemudian dilakukan secara rutin setiap hari rabu didepan kedutaan besar Jepang yang kemudian dikenal dengan nama *Wednesday Demonstration*. *Wednesday Demonstration* ini kemudian menarik perhatian pemerintah Korea Selatan. sebagai wujud dukungannya, pemerintah kemudian membentuk *Non Government Organization* bernama *Korean Council*. *Korean Council* ini sendiri memiliki tugas untuk menyebarkan isu *Jugun Ianfu* ke seluruh masyarakat Korea dan melakukan demonstrasi rutin untuk mendesak Jepang untuk bertanggung Jawab terkait kebijakan tersebut.

Melihat seringnya demonstrasi terkait permasalahan budak seksual ini. Pemerintah Jepang kemudian meminta maaf terkait permasalahan perbudakan seks tersebut. Melalui Yohei Kono selaku sekretaris kabinet Jepang, Jepang meminta maaf sebesar besarnya terkait permasalahan perbudakan seks yang terjadi selama Jepang menduduki Korea Selatan.

“The then-Japanese military was, directly or indirectly, involved in the establishment and management of the comfort states”. “The recruitment of the comfort women was conducted mainly by private recruiters who acted in response to the

⁵³ Kan Kimura, “Discourses About Comfort Women in Japan, South Korea, and International Society”, *International Relations and Diplomacy*, December 2015, Vol. 3, No. 12, 809-817.

request of the military.” –Yohei Kono, Head of Secretary Cabinet of Japan Government⁵⁴

Selain meminta maaf, Jepang juga membentuk *Asian Women Fund* (AWF) yang bertugas untuk menyalurkan dana kompensasi ke para korban perbudakan seks diseluruh dunia termasuk Korea Selatan. Para *Jugun Ianfu* pada awalnya tidak langsung menerima kompensasi tersebut karena merasa bahwa cara Jepang dalam meminta maaf dan pemberian kompensasi tersebut tidak tulus.⁵⁵ Para korban berharap bahwa pemerintah secara terbuka meminta maaf secara langsung ke para korban, memasukan *Jugun Ianfu* kedalam kurikulum sejarah Jepang agar generasi Jepang selanjutnya mengetahui kebijakan ini dan tidak mengulangnya dikemudian hari, dan menuntut untuk menghukum para pihak yang terlibat dalam kebijakan perbudakan seksual ini.⁵⁶

Pada tahun 1995, perdana menteri Jepang Tomiichi Murayama secara pribadi juga meminta maaf terkait pendudukan Jepang dimasa lalu.

“In the hope that no such mistake be made in the future, I regard, in a spirit of humility, these irrefutable facts of history, and express here once again my feelings of deep remorse and state my heartfelt apology. Allow me also to express my feelings of profound mourning for all victims, both

⁵⁴Natalie Wong, “Trappings of the past : Should Japan formally apologize for its past war sex crimes”, diakses dari <http://mcgilltribune.com/comfort-women-japan-world-war-two-apology/> pada 21 Maret 2018 pukul 13.52

⁵⁵ Rizka Fauzia, “Diplomasi Korea Selatan Mendesak Jepang Menandatangani Agreemen on Comfort Women Tahun 2011-2015”. JOM FISIP Vol. 4 No. 1-15, 5

⁵⁶ Asian Women Fund, “The “Comfort Women” Issue and the Asian Women’s Fund”, p. 31-32, diakses dari <http://www.awf.or.jp/pdf/0170.pdf> pada 21 Maret 2018 pukul 13.31 PM.

*at home and abroad, of that history.” Tomiichi Murayama – Prime Minister of Japan*⁵⁷

Ia berharap bahwa hubungan Jepang dan Korea Selatan dapat berjalan dengan baik dan tidak lagi dihadang oleh isu-isu sejarah yang kemudian dapat memperburuk dan mengganggu hubungan di antara keduanya. Ia menyatakan bahwa hubungan Jepang dan Korea Selatan sangat penting terutama untuk menjaga stabilitas kawasan di Asia Timur.⁵⁸

Namun, sepertinya sikap Yohei Kono dan Tomiichi Murayama terkait permasalahan ini tidak sejalan dengan Shinzo Abe yang kini menjabat sebagai perdana menteri Jepang. Shinzo Abe sebaliknya menolak untuk mengakui keterlibatan Pemerintah Jepang di dalam *Comfort System*. Menurutinya, tidak ada bukti yang jelas mengenai keterlibatan pemerintahan Jepang dalam mengorganisasikan *Comfort System*. Selain itu, Abe juga menyangkal adanya tindakan koersif yang dilakukan oleh tentara Jepang dalam merekrut perempuan pribumi sebagai *Jugun Ianfu*.⁵⁹

Shinzo Abe juga mewacanakan untuk meninjau kembali terkait pernyataan Yohei Kono, dan menyiapkan tim ahli untuk meneliti kembali keabsahan statement tersebut. Hal ini tentu menimbulkan pertentangan dari banyak pihak termasuk dari Yohei Kono dan Tomiichi Murayama. Mereka

⁵⁷ Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Statement by Prime Minister Tomiichi Murayama

“On the occasion of the 50th anniversary of the war's end” (15 August 1995)”, diakses dari

<http://www.mofa.go.jp/announce/press/pm/murayama/9508.html>

pada 20 April 2018

⁵⁸ Fauzia, Loc.Cit

⁵⁹ Hirofumi Hayashi, “Disputes in Japan over the Japanese Military “Comfort Women” System and Its Perception in History”, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 617, *The Politics of History in Comparative Perspective* (May, 2008), pp. 123-132, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/25098017> pada 29 September 2017

menganggap bahwa dengan usaha Abe untuk menolak Pernyataan Kono akan menyebabkan terbukanya kembali perselisihan antara Jepang dan negara bekas pendudukan termasuk Korea Selatan. selain Yohei Kono dan Tomoiichi Murayama, banyak politikus yang menjadi lawan politik Abe mengancam wacana peninjauan kembali statement Kono tersebut.

Pernyataan Abe secara tidak langsung menyangkal bukti bukti sejarah yang dipaparkan didalam Pengadilan kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan tahun 2000. Dalam pengadilan tersebut, dipaparkan beberapa bukti yang secara jelas menjelaskan keterlibatan Jepang dalam pengorganisasian *Comfort Station*. Seperti misalnya bukti berupa dokumen telegram dan memo terkait perekrutan tentara Taiwan No. 602. Dokumen ini berisi upaya Jepang untuk menyamarkan sifat koersif dari *Comfort System* dan menyebutkan adanya keterlibatan pihak lokal dan militer terkait sistem ini.⁶⁰ Selain itu dokumen ini menyebutkan terkait adanya peringatan terkait perekrutan *Jugun Ianfu* yang dilakukan dengan penculikan dan usaha usaha lain yang bertentangan dengan usaha usaha menjaga kehormatan Jepang. Hal ini berarti selama berjalannya *Comfort System* ini, perekrutan tidaklah dilakukan secara sukarela melainkan dengan cara cara yang tidak manusiawi.⁶¹ Selain itu, dokumen telegram ini juga menunjukkan adanya keterlibatan menteri perang Hideki Tojo dan komandan tentara Jepang Rikichi Ando dalam mengorganisasikan *Comfort System*.⁶²

Selain dokumen berupa telegram, terdapat pula dokumen kedua yang menjadi bukti keterlibatan Jepang dalam *Comfort System*, yaitu, adanya laporan sekutu yang berisi intrograsi yang dilakukan oleh *U.S. Office of War Information Psychological Warfare Team* terhadap 20 perempuan yang

⁶⁰ Komisi Hak Asasi Manusia. “Pengadilan Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan”. P, p.41

⁶¹ Ibid, p.42

⁶² Ibid, p.43

diidentifikasi sebagai *Jugun Ianfu*. Hasil intrograsi ini kemudian dipublikasikan dalam dalam “*U.S. Office of War Interrogation Report No.49*”. Dalam intrograsi yang dilakukan oleh sekutu tersebut. didapat fakta bahwa Jepang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mengelola *Comfort Station*. Selain itu, dalam dokumen ini menunjukkan bahwa *Comfort System* ini tersebar di seluruh daerah pendudukan Jepang.⁶³

Apa yang dilakukan oleh Shinzo Abe dalam isu ini bisa dipahami sebagai usaha Jepang dalam memperbaiki citranya. Setelah perang dunia II, Jepang memang gencar untuk memperbaiki citranya dan berusaha menghilangkan bayangan sejarah imperialis dimasa lalu dengan menghilangkan dokumen dokumen yang terkait dengan itu. Namun, disisi lain, usaha Jepang ini secara tidak langsung melukai banyak pihak. Sekalipun Jepang ingin memperbaiki citranya sebagai sebuah negara, jepang tetap harus bertanggung jawab terhadap apa yang dialami negara negara yang pernah didudukinya. Jepang tidak boleh mengingkari sejarah bahwa mereka pernah melakukan penjajahan dan menerapkan kebijakan yang brutal selama menjajah banyak negara.

D. Gejolak Hubungan Jepang dan Korea Selatan terkait Jugun Ianfu

Hubungan Jepang dan Korea Selatan mulai mengalami pasang surut terkait permasalahan sejarah termasuk didalamnya terkait permasalahan *Jugun Ianfu* ini. Hal ini tambah dengan sikap dingin masing masing negara dalam sengketa teritorial diantara keduanya. Pasca pernyataan jepang terkait wacana untuk meninjau kembali bukti bukti dibalik Pernyataan Kono. Korea Selatan bereaksi dengan memanggil duta besar Jepang untuk Korea Selatan. saat itu Wakil Menteri Luar Negeri Cho Tae-Yong memanggil Besso Koro selaku Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan untuk meminta penjelasan terkait wacana

⁶³ Ibid, p.48

peninjauan kembali terhadap Pernyataan Kono.⁶⁴ Bagi Korea Selatan, upaya Jepang tersebut merupakan usaha Jepang untuk berpaling dari bukti sejarah yang ada terkait isu *Jugun Ianfu*.⁶⁵

Melihat banyaknya komentar terkait statementnya untuk meninjau kembali Pernyataan Kono, Shinzo Abe kemudian berusaha untuk memperbaiki keadaan dengan menyatakan dukungannya terhadap Pernyataan Kono.⁶⁶ Pernyataan ini disampaikan langsung didepan komisi parlemen Jepang. Namun sepertinya, hal ini tidak berdampak banyak karena Jepang sepertinya tetap tidak meminta maaf dan tetap berpegang teguh bahwa permasalahan terkait sejarah sudah selesai dalam perjanjian hubungan diplomatik tahun 1965.⁶⁷

Dampak dari permasalahan *Jugun Ianfu* ini juga merembet ke perjanjian pertahanan yang hendak ditandatangani keduanya pada tahun 2012. Secara mendadak, Korea Selatan meminta penundaan penandatanganan perjanjian ini yang saat itu sejatinya akan di laksanakan di Tokyo.⁶⁸ Penundaan ini terkait banyaknya sentiment Anti-Jepang dari

⁶⁴ Jurnal Asia, “Korsel Protes Jepang Terkait Maaf kepada Jugun Ianfu”, diakses dari <http://www.jurnalasia.com/internasional/korsel-protos-jepang-terkait-maaf-kepada-jugun-ianfu/>, pada 22 Maret 2018

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Radio Australia, “PM Jepang Menyampaikan Maaf pada Mantan Jugun Ianfu”, diakses dari <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2007-03-27/pm-jepang-menyampaikan-maaf-pada-mantan-jugun-ianfu/74234>, pada 22 Maret 2018

⁶⁷ Devi Angraini Oktavika, “Korsel Minta Jepang Pertanggungjawabkan Perbudakan Seks Masa Perang”, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/08/15/m8sori-korsel-minta-jepang-pertanggungjawabkan-perbudakan-seks-masa-perang>, pada 28 Maret 2018

⁶⁸ Steve Herman, “Korea Selatan Tangguhkan Perjanjian Militer dengan Jepang”, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/perjanjian-militer-korsel--jepang-ditangguhkan-/1351968.html>, pada 22 Maret 2018

warga sipil Korea Selatan akibat belum terselesaikannya permasalahan historis dan teritorial diantara keduanya. Banyak warga Korea Selatan menilai, jika penandatanganan ini terlaksana, maka secara tidak langsung Korea Selatan memaafkan Jepang terkait permasalahan historis dan teritorial ini.⁶⁹ Di tahun yang sama pula, presiden Korea Selatan saat itu, Lee Myung Bak meminta Jepang untuk segera meminta maaf terkait permasalahan perbudakan seksual. Desakan permintaan maaf ini disampaikan langsung dalam pidato peringatan 67 Tahun berakhirnya kolonialisme⁷⁰ di Korea Selatan. Ia menganggap permintaan maaf dari Jepang sesuatu yang perlu dilakukan, karena jika tidak diselesaikan maka akan memperumit hubungan diantara keduanya.⁷¹

Lebih lanjut, isu *Jugun Ianfu* kemudian dibahas dalam pertemuan Trilateral antara Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok. Pertemuan di adakan setahun sekali, namun, sempat tertunda akibat ketegangan hubungan Jepang tahun 2012.⁷² Dalam pertemuan ini, Park Geun Hye yang menggantikan Lee Myung Bak selaku Presiden Korea Selatan meminta Jepang untuk segera mungkin secara resmi meminta maaf dan memberikan kompensasi yang tepat terhadap para Comfort Women.⁷³ Permintaan ini cukup beralasan, karena melihat banyak Comfort Women yang sudah tua. Selain itu, muncul desakan untuk segera menyelesaikan persoalan teritorial yang

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Oktavika, Op.Cit

⁷¹ Ibid

⁷² Melodya Apriliana, “Hubungan China, Jepang, dan Korsel Membaik Usai Pertemuan”, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151102170959-113-88980/hubungan-china-jepang-dan-korsel-membaik-usai-pertemuan> pada 20 april 2018

⁷³ Denny Armandhanu, “Pertemuan Korsel-China-Jepang Akan Bahas Jugun Ianfu”, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151030145533-113-88456/pertemuan-korsel-china-jepang-akan-bahas-jugun-ianfu>, pada 23 Maret 2018

selama ini menghambat hubungan dan mempengaruhi stabilitas keamanan di Asia Timur.⁷⁴

Banyaknya desakan dari Korea Selatan dan Tiongkok, ditambah lagi dengan terguncangnya stabilitas keamanan di Asia Timur dikarenakan meningkatnya intensitas uji balistik oleh Korea Utara, membuat Jepang harus mengambil keputusan untuk menegosiasikan permintaan maaf dengan Korea Selatan, meskipun pada akhirnya Jepang mendapat tekanan didalam negeri oleh para nasionalis yang merasa Jepang tidak perlu untuk melakukan permintaan maaf. Namun, momen ini merupakan momen bersejarah bagi kedua negara terkait penuntasan isu perbudakan seks. Tanggal 28 Desember 2015, menjadi momen yang tepat dikarenakan ditanggal yang sama 55 tahun lalu Jepang dan Korea Selatan meneken perjanjian terkait pembentukan hubungan diplomatik.

⁷⁴ Ibid